

Reartikulasi Amar Ma'ruf Nahi Munkar sebagai Konseling Sosial Emansipatoris: Fondasi Teologi Transformatif Anti-Penindasan

Rearticulating Amar Ma'ruf Nahi Munkar as Emancipatory Social Counseling: A Foundation for Transformative Anti-Oppression Theology

Nadila Az'zahra¹, Nilna Izzah Afkarina², Aminatuz Zuhriyah³, Ali Hasan Siswanto⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

ARTICLE INFO

Article history:

Received 15 May 2026

Revised 20 May 2026

Accepted 22 May 2026

Available online 01 June 2026

Keywords

amar ma'ruf nahi munkar; konseling sosial; teologi transformatif; emansipasi; penindasan; tasawuf sosial; perubahan sosial.

Keywords:

enjoining good and forbidding evil; social counseling; transformative theology; emancipation; oppression; social Sufism; social change.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Yavasan Daarul Huda

ABSTRACT

The persistence of oppression in contemporary society, manifested in structural inequality, cultural domination, and epistemic marginalization, demonstrates the failure of normative theological approaches to bring about substantive social change. Although the concept of enjoining good and forbidding evil theologically possesses emancipatory potential, its practice remains trapped within a moralistic-formalistic framework and has not yet been operationalized as a mechanism for systemic social transformation. The research gap lies in the absence of an integrative model that connects theological, psychological, and sociological dimensions within a framework of liberation praxis. This study aims to rearticulate enjoining good and forbidding evil as a paradigm for emancipatory social counseling within a transformative theological framework. The theoretical approach employed is interdisciplinary, integrating Islamic theology, critical social philosophy, and emancipatory counseling theory. The research method employed is qualitative with a conceptual-philosophical approach through critical and hermeneutic analysis of classical and contemporary sources. The main argument of this research asserts that enjoining good and forbidding evil can be reconstructed as a social counseling process that functions not only as moral control but also as a

mechanism for critical awareness, internalization of prophetic values, and transformation of oppressive social structures. Thus, theology no longer remains normative but functions as a liberating, practical force.

ABSTRACT

Persistensi penindasan dalam masyarakat kontemporer yang termanifestasi dalam ketimpangan struktural, dominasi kultural, dan marginalisasi epistemik menunjukkan kegagalan pendekatan teologis normatif dalam menghadirkan perubahan sosial yang substantif. Meskipun konsep amar ma'ruf nahi munkar secara teologis mengandung potensi emansipatoris, praktiknya masih terjebak dalam kerangka moralistik-formalistik dan belum teroperasionalisasi sebagai mekanisme transformasi sosial yang sistemik. Kesenjangan penelitian (research gap) terletak pada absennya model integratif yang menghubungkan dimensi teologis, psikologis, dan sosiologis dalam kerangka praksis pembebasan. Penelitian ini bertujuan untuk mereartikulasi amar ma'ruf nahi munkar sebagai paradigma konseling sosial emansipatoris dalam kerangka teologi transformatif. Pendekatan teoritis yang digunakan bersifat interdisipliner, mengintegrasikan teologi Islam, filsafat sosial kritis, dan teori konseling emansipatoris. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan konseptual-filosofis melalui analisis kritis dan hermeneutik terhadap sumber-sumber klasik dan kontemporer. Argumen utama penelitian ini menegaskan bahwa amar ma'ruf nahi munkar dapat direkonstruksi sebagai proses konseling sosial yang tidak hanya berfungsi sebagai kontrol moral, tetapi juga sebagai mekanisme penyadaran kritis, internalisasi nilai profetik, dan transformasi struktur sosial yang menindas.

PENDAHULUAN

Realitas sosial kontemporer memperlihatkan bahwa penindasan tidak hanya bertahan sebagai residu historis, tetapi justru mengalami transformasi dalam bentuk yang semakin kompleks dan sistemik. Ketimpangan ekonomi global, dominasi kultural berbasis kekuasaan, serta marginalisasi kelompok rentan menunjukkan bahwa modernitas tidak secara otomatis

melahirkan keadilan, melainkan seringkali mereproduksi bentuk-bentuk baru ketidakadilan struktural. Dalam konteks masyarakat Muslim, problem ini menjadi semakin paradoks karena nilai-nilai normatif Islam secara eksplisit menegaskan prinsip keadilan (*al-'adl*), kesetaraan (*al-musāwah*), dan pembebasan (*tahrīr*). Namun, dalam praktiknya, nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya teraktualisasi sebagai kekuatan transformasi sosial yang efektif. Konsep *amar ma'ruf nahi munkar*, yang secara teologis mengandung mandat etis untuk membangun tatanan sosial yang adil, seringkali direduksi menjadi praktik moralistik yang bersifat individual dan simbolik, alih-alih menjadi instrumen perubahan struktural. Studi mutakhir menunjukkan bahwa implementasi *amar ma'ruf nahi munkar* masih cenderung berorientasi pada kontrol sosial normatif dan belum berkembang sebagai mekanisme emansipatoris yang mampu menyentuh akar ketidakadilan sosial¹. Hal ini mengindikasikan adanya problem mendasar dalam artikulasi teologi Islam sebagai praksis sosial yang membebaskan.

Dalam lima tahun terakhir, kajian tentang teologi transformatif dan praksis keagamaan mengalami perkembangan signifikan, terutama dalam upaya mengintegrasikan dimensi spiritual dengan isu-isu keadilan sosial. Sejumlah penelitian menekankan pentingnya rekonstruksi teologi agar lebih responsif terhadap problem kontemporer, seperti ketidakadilan gender, marginalisasi sosial, dan krisis kemanusiaan. Misalnya, rekonstruksi teologi Islam berbasis nilai keadilan dan kebebasan menunjukkan bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* dapat menjadi fondasi etika untuk membangun kesadaran kritis dan perubahan sosial yang inklusif². Selain itu, pendekatan spiritual-humanistik dalam pendidikan Islam juga menegaskan bahwa internalisasi nilai-nilai profetik mampu membangun kesadaran individu dan kolektif dalam menghadapi realitas ketertindasan³. Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih beroperasi dalam kerangka normatif atau pedagogis, tanpa mengembangkan model operasional yang sistemik untuk mentransformasikan kesadaran tersebut menjadi praksis sosial yang terstruktur. Di sisi lain, studi tentang komunikasi dan dakwah Islam menunjukkan bahwa pendekatan *amar ma'ruf nahi munkar* masih didominasi oleh metode persuasif atau normatif, dengan keterbatasan dalam mengintegrasikan dimensi psikologis dan sosial secara holistik⁴. Dengan demikian, meskipun terdapat kemajuan dalam wacana teologi transformatif, masih terdapat kekosongan dalam pengembangan paradigma yang mampu menghubungkan teologi dengan mekanisme perubahan sosial yang konkret dan berkelanjutan.

Berdasarkan telaah tersebut, celah penelitian (research gap) terletak pada absennya kerangka konseptual yang secara integratif menggabungkan dimensi teologis, psikologis, dan sosiologis dalam satu model praksis pembebasan. Kajian tentang *amar ma'ruf nahi munkar* masih terfragmentasi antara pendekatan normatif, pedagogis, dan komunikatif, tanpa menghasilkan sintesis metodologis yang dapat dioperasionalkan sebagai strategi transformasi sosial. Selain itu, pendekatan konseling dalam konteks Islam cenderung berfokus pada aspek individual-psikologis dan belum dikembangkan sebagai instrumen perubahan sosial yang emansipatoris. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan pertanyaan utama: bagaimana mereartikulasi *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai paradigma konseling sosial yang emansipatoris dan transformatif? Bagaimana integrasi antara nilai-nilai teologis, kesadaran psikologis, dan aksi sosial dapat membentuk model perubahan yang mampu mendekonstruksi struktur penindasan? Dengan demikian, tesis utama yang diajukan adalah bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* perlu direkonstruksi tidak hanya sebagai

¹ Jihan Afri Batubara And Ahmad Tamrin Sikumbang, *Komunikasi Islam Dalam Penegakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, No. 2 (2025).

² Sitti Jamilah And Muhammad Saleh, "Reconstruction Of Islamic Theology For Gender-Responsive Moral Education: From Tawhid To Amar Ma'ruf Nahi Munkar," *Open Access* 32, No. 4 (2025).

³ Arif Wibowo, "Humanisation Of Spiritual Education In Fostering Marginalized Communities At Majelis Ta'lim Sabilu Taubah," *Jurnal Keislaman* 8, No. 1 (2025): 148–61, <https://doi.org/10.54298/Jk.V8i1.330>.

⁴ Fachrur Rizha, *Implementasi Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Kehidupan Sosial*, N.D.

kewajiban moral normatif, tetapi sebagai proses konseling sosial yang sistemik, yang berfungsi sebagai mekanisme penyadaran kritis, internalisasi nilai profetik, dan transformasi struktur sosial yang menindas.

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada formulasi paradigma **konseling profetik-emansipatoris** sebagai bentuk reartikulasi teologi Islam yang bersifat transformatif. Paradigma ini menawarkan integrasi antara dimensi wahyu (teologis), kesadaran diri (psikologis), dan perubahan struktur (sosiologis) dalam satu kerangka konseptual yang holistik. Kebaruan (novelty) penelitian ini tidak hanya pada reinterpretasi *amar ma'ruf nahi munkar*, tetapi juga pada posisinya sebagai metode konseling sosial yang melampaui pendekatan normatif dan persuasif konvensional. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan dalam literatur dengan menghadirkan model teologi yang tidak berhenti pada tataran doktrinal, melainkan berfungsi sebagai energi praksis yang mampu membangun masyarakat tanpa penindasan. Lebih jauh, artikel ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan Studi Islam, khususnya dalam bidang teologi transformatif, filsafat sosial Islam, dan tasawuf sosial, serta memberikan landasan konseptual bagi pengembangan praksis keagamaan yang lebih responsif terhadap tantangan ketidakadilan global kontemporer.

Kerangka teoretis artikel ini dibangun di atas dialog kritis antara teori klasik dan kontemporer mengenai kekuasaan, penindasan, dan pembebasan, dengan tujuan merumuskan suatu paradigma integratif yang mampu menjelaskan sekaligus mentransformasikan realitas sosial. Dalam diskursus global, persoalan penindasan tidak lagi dipahami semata sebagai relasi dominasi yang bersifat koersif, melainkan sebagai jaringan relasi kuasa yang kompleks, tersebar, dan sering kali tidak kasat mata. Dalam konteks ini, pemikiran Michel Foucault menjadi titik awal penting, terutama melalui konsep *power/knowledge* yang menegaskan bahwa kekuasaan tidak hanya represif, tetapi juga produktif—membentuk subjek, norma, dan kebenaran melalui mekanisme diskursif. Kekuasaan, dalam perspektif ini, tidak dimiliki secara eksklusif oleh aktor tertentu, melainkan beroperasi secara difus dalam jaringan sosial dan institusional. Dengan demikian, penindasan tidak hanya terjadi melalui kekerasan langsung, tetapi juga melalui normalisasi nilai, internalisasi norma, dan produksi “kebenaran” yang menguntungkan kelompok dominan. Pendekatan ini penting untuk memahami mengapa penindasan dapat bertahan bahkan dalam sistem yang secara formal menjunjung tinggi keadilan dan kebebasan.

Namun demikian, analisis Foucauldian perlu dilengkapi dengan perspektif struktural-kultural yang lebih eksplisit, sebagaimana dikembangkan oleh Antonio Gramsci melalui konsep hegemoni. Gramsci menunjukkan bahwa dominasi tidak hanya dipertahankan melalui kekuatan koersif negara, tetapi juga melalui persetujuan (*consent*) yang dibangun dalam ranah budaya dan masyarakat sipil. Hegemoni bekerja dengan menjadikan nilai-nilai dominan sebagai “common sense” yang diterima tanpa kritik, sehingga kelompok tertindas secara tidak sadar turut mereproduksi sistem yang menindas mereka⁵. Dalam konteks ini, penindasan bersifat internal sekaligus eksternal: ia tidak hanya dipaksakan dari luar, tetapi juga diinternalisasi dalam kesadaran subjek. Dengan menggabungkan perspektif Foucault dan Gramsci, artikel ini memandang penindasan sebagai fenomena multidimensional yang melibatkan relasi diskursif, struktural, dan kultural secara simultan. Hal ini membuka ruang bagi pendekatan yang tidak hanya bersifat resistif, tetapi juga transformatif melalui rekonstruksi kesadaran dan budaya.

Lebih lanjut, dimensi kesadaran kritis dalam proses pembebasan diperkuat melalui pemikiran Paulo Freire, khususnya konsep *conscientization* (*penyadaran kritis*). Freire

⁵ Elsa Lailatul Marfu'ah Et Al., “The Nexus Of Power And Oppression: A Foucauldian And Gramscian Study Of Prospero's Dominance In The Tempest,” *Elite : English And Literature Journal* 10, No. 2 (2023): 129–42, <https://doi.org/10.24252/Elite.V10i2.43217>.

menegaskan bahwa pembebasan tidak dapat dicapai tanpa transformasi kesadaran individu terhadap struktur sosial yang menindas. Kesadaran kritis memungkinkan individu untuk memahami kontradiksi sosial dan bertindak secara reflektif untuk mengubahnya. Dalam kerangka ini, penindasan dipahami sebagai proses dehumanisasi yang harus dilawan melalui praksis—yakni kesatuan antara refleksi dan tindakan⁶. Pemikiran Freire menjadi jembatan penting antara analisis struktural dan praksis emansipatoris, karena menempatkan subjek sebagai agen aktif dalam perubahan sosial. Dengan demikian, pembebasan bukan hanya proyek struktural, tetapi juga proses pedagogis dan eksistensial yang melibatkan transformasi kesadaran individu dan kolektif.

Dalam tradisi filsafat sosial kontemporer, kontribusi Jürgen Habermas juga menjadi relevan, khususnya melalui konsep *tindakan komunikatif* (*communicative action*) dan etika diskursus. Habermas menekankan bahwa pembebasan dapat dicapai melalui komunikasi yang bebas dari dominasi, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan makna dan keputusan sosial. Dalam perspektif ini, penindasan dipahami sebagai distorsi komunikasi yang menghambat rasionalitas dan partisipasi publik. Oleh karena itu, transformasi sosial memerlukan rekonstruksi ruang komunikasi yang inklusif dan dialogis. Pendekatan ini memberikan dasar normatif bagi paradigma yang diusulkan dalam artikel ini, terutama dalam menekankan pentingnya dialog, partisipasi, dan kesetaraan sebagai prasyarat pembebasan.

Kerangka teoretis ini kemudian diperkaya dengan perspektif Islam, khususnya melalui pemikiran tokoh-tokoh seperti Fazlur Rahman dan Ali Shariati yang menekankan dimensi etis dan transformatif dari ajaran Islam. Rahman menegaskan bahwa Al-Qur'an harus dipahami sebagai teks yang memiliki orientasi moral-sosial yang dinamis, bukan sekadar doktrin normatif yang statis. Sementara itu, Shariati mengartikulasikan Islam sebagai ideologi pembebasan yang menentang segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Dalam konteks ini, konsep *amar ma'ruf nahi munkar* dapat dipahami sebagai prinsip etis yang memiliki potensi transformatif, bukan hanya sebagai kewajiban moral individual. Dengan mengintegrasikan perspektif ini, artikel ini menempatkan teologi Islam dalam dialog dengan teori kritis global, sehingga menghasilkan kerangka konseptual yang bersifat interdisipliner dan kontekstual.

Berdasarkan sintesis tersebut, artikel ini mengembangkan kerangka konseptual **konseling profetik-emansipatoris** sebagai paradigma baru dalam memahami dan mengatasi penindasan. Paradigma ini mengintegrasikan tiga dimensi utama: (1) dimensi teologis sebagai sumber nilai normatif dan etis; (2) dimensi psikologis sebagai proses penyadaran dan transformasi diri; dan (3) dimensi sosiologis sebagai arena perubahan struktural dan kolektif. Dalam kerangka ini, *amar ma'ruf nahi munkar* direartikulasi sebagai proses konseling sosial yang melibatkan dialog, refleksi, dan aksi transformasional. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya bersifat normatif atau kritis, tetapi juga praksis dan aplikatif. Secara teoretis, kontribusi utama artikel ini adalah menghadirkan sintesis antara teologi Islam dan teori kritis global dalam satu kerangka yang koheren, sekaligus menawarkan model baru yang dapat memperkaya diskursus teologi transformatif dan studi Islam kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif dengan basis konseptual-filosofis dan hermeneutik-kritis**, yang dipilih karena karakter permasalahan yang dikaji tidak bersifat

⁶ Wilton Lodge, "Confronting Repressive Ideologies With Critical Pedagogy In Science Classrooms," *Cultural Studies Of Science Education* 16, No. 2 (2021): 609–20, <https://doi.org/10.1007/S11422-021-10047-7>.

empiris-kuantitatif, melainkan berkaitan dengan konstruksi makna, nilai, dan transformasi konseptual dalam diskursus teologi dan sosial. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali dimensi ontologis dan epistemologis dari konsep *amar ma'ruf nahi munkar* serta merekonstruksinya dalam kerangka konseling sosial emansipatoris. Secara filosofis, penelitian ini berakar pada paradigma interpretatif (*interpretivism*), yang memandang realitas sosial sebagai konstruksi makna yang dibentuk melalui interaksi historis, kultural, dan diskursif. Dalam konteks ini, pendekatan hermeneutik digunakan sebagai kerangka utama untuk memahami teks-teks keagamaan dan sosial secara kontekstual, dengan mempertimbangkan relasi antara teks, konteks, dan subjek penafsir. Studi mutakhir menegaskan bahwa hermeneutika tidak hanya berfungsi sebagai metode interpretasi teks, tetapi juga sebagai pendekatan epistemologis yang mampu menjembatani antara wahyu dan realitas sosial kontemporer⁷. Dengan demikian, metode ini relevan untuk mengkaji bagaimana konsep normatif Islam dapat direartikulasi menjadi paradigma praksis yang transformatif.

Sumber data dalam penelitian ini bersifat **multi-layered** dan intertekstual, mencakup tiga kategori utama. Pertama, sumber primer berupa teks-teks normatif Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, yang menjadi basis teologis bagi konsep *amar ma'ruf nahi munkar*. Kedua, sumber klasik berupa kitab-kitab tafsir, karya ulama, serta literatur tasawuf dan filsafat Islam yang merepresentasikan tradisi intelektual Islam dalam memahami konsep tersebut secara historis. Ketiga, sumber sekunder berupa literatur akademik kontemporer (artikel jurnal bereputasi Scopus/WoS, buku ilmiah, dan kajian interdisipliner) yang membahas teologi transformatif, teori sosial kritis, dan pendekatan konseling. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya dialog antara teks klasik dan wacana kontemporer, sehingga menghasilkan pemahaman yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa integrasi antara sumber klasik dan kontemporer dalam studi Islam menjadi strategi metodologis penting untuk menghindari reduksionisme normatif dan membuka ruang reinterpretasi yang relevan dengan tantangan zaman⁸.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **studi kepustakaan (library research)** yang sistematis dan selektif, dengan kriteria inklusi berbasis relevansi teoretis, kebaruan (lima tahun terakhir), serta reputasi akademik sumber (Scopus/WoS). Proses ini melibatkan identifikasi, klasifikasi, dan sintesis literatur yang berkaitan dengan tiga domain utama: (1) teologi Islam dan konsep *amar ma'ruf nahi munkar*; (2) teori sosial kritis tentang penindasan dan pembebasan; serta (3) teori konseling dan pendekatan emansipatoris. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan fenomenologis secara terbatas, khususnya dalam memahami pengalaman sosial terkait praktik keagamaan dan penindasan, sebagaimana digunakan dalam studi-studi kualitatif kontemporer. Meskipun tidak menggunakan data empiris lapangan secara langsung, pendekatan ini tetap mempertimbangkan realitas sosial sebagai horizon interpretasi, sehingga hasil analisis tidak terlepas dari konteks praksis.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan **analisis hermeneutik-kritis dan konstruktif** yang dilakukan dalam tiga tahap utama. Pertama, tahap interpretasi tekstual, yaitu memahami makna normatif dari teks Al-Qur'an, Hadis, dan literatur klasik terkait konsep *amar ma'ruf nahi munkar*. Kedua, tahap analisis kontekstual, yaitu mengaitkan makna tersebut dengan realitas sosial kontemporer, khususnya dalam konteks penindasan dan ketidakadilan struktural. Ketiga, tahap rekonstruksi konseptual, yaitu merumuskan paradigma baru yang

⁷ Mariano D. Gillo, "Fundamentals Of Hermeneutics As A Qualitative Research Theoretical Framework," *European Journal Of Education And Pedagogy* 2, No. 3 (2021): 42–45, <https://doi.org/10.24018/Ejedu.2021.2.3.43>.

⁸ Lutfiah Holifa Balkis Et Al., "Pendekatan Hermeneutik Dalam Pengkajian Islam: Perspektif Pendidikan Agama Islam Kontekstual," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 3, No. 3 (2024): 93–107, <https://doi.org/10.55606/Jurriish.V3i3.7281>.

mengintegrasikan dimensi teologis, psikologis, dan sosiologis dalam kerangka konseling profetik-emansipatoris. Pendekatan hermeneutik memungkinkan peneliti untuk melakukan “pergerakan ganda” (*double movement*) antara teks dan konteks, sebagaimana ditegaskan dalam studi hermeneutik kontemporer dalam kajian Islam⁹. Sementara itu, dimensi kritis digunakan untuk mengidentifikasi dan mendekonstruksi struktur penindasan yang tersembunyi dalam praktik sosial dan keagamaan, sehingga analisis tidak berhenti pada pemahaman, tetapi juga mengarah pada transformasi.

Secara akademik, pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa objek kajian penelitian ini bersifat normatif-konseptual sekaligus praksis-transformatif, sehingga memerlukan pendekatan yang mampu mengintegrasikan analisis teks, konteks, dan praksis. Pendekatan kuantitatif atau empiris murni tidak memadai untuk menjelaskan kompleksitas relasi antara teologi dan perubahan sosial, karena cenderung mengabaikan dimensi makna dan nilai yang menjadi inti dari studi keagamaan. Sebaliknya, pendekatan kualitatif-hermeneutik memberikan fleksibilitas epistemologis untuk mengeksplorasi dinamika makna dan memungkinkan konstruksi teori baru yang kontekstual. Penelitian mutakhir menegaskan bahwa metode kualitatif memiliki peran yang semakin penting dalam berbagai disiplin ilmu karena kemampuannya dalam menangkap kompleksitas realitas sosial dan menghasilkan pemahaman yang mendalam¹⁰. Dengan demikian, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya relevan secara epistemologis, tetapi juga strategis dalam menghasilkan kontribusi teoretis yang signifikan bagi pengembangan teologi transformatif dan studi Islam kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka konseptual pembahasan ini berangkat dari premis bahwa penindasan (*zulm*) bukan sekadar fenomena sosial, melainkan juga konstruksi teologis dan epistemologis yang beroperasi dalam relasi kuasa, kesadaran, dan struktur. Dalam tradisi Islam, *zulm* secara ontologis dipahami sebagai “menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya,” yang mencakup dimensi teologis (syirik), sosial (ketidakadilan), dan eksistensial (ketidakadilan terhadap diri sendiri). Dengan demikian, penindasan tidak dapat direduksi hanya pada relasi dominasi eksternal, tetapi juga mencakup internalisasi nilai yang melanggengkan ketidakadilan. Perspektif ini sejalan dengan analisis kontemporer yang melihat penindasan sebagai fenomena multidimensional yang melibatkan struktur, budaya, dan kesadaran. Oleh karena itu, setiap upaya pembebasan harus bersifat integratif—menghubungkan transformasi struktur dengan transformasi kesadaran.

Dalam konteks normatif Islam, Al-Qur'an secara eksplisit menempatkan keadilan sebagai prinsip fundamental kehidupan sosial. Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ

(“Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penegak keadilan...”) (QS. An-Nisa: 4:135)

Ayat ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga performatif, karena menuntut keterlibatan aktif subjek dalam menegakkan keadilan bahkan terhadap diri sendiri. Dalam tafsir klasik seperti Ibn Kathir dan Al-Qurtubi, ayat ini dipahami sebagai kewajiban universal yang melampaui relasi personal dan mencakup dimensi sosial-politik. Sementara itu, tafsir kontemporer menekankan bahwa keadilan dalam ayat ini bersifat struktural dan menuntut

⁹ M. Nuzulul Ulum Et Al., *Dari Teks Ke Konteks: Relevansi Metodologis Hermeneutik Dalam Penafsiran Al-Qur'an Dan Hadis Era Kontemporer*, N.D.

¹⁰ Zuhdiyah Zuhdiyah Et Al., “Religious Belief: An Interpretative Phenomenological Analysis On The Experience Of Minority Students In Implementing Religious Education,” *Qualitative Research In Education* 13, No. 3 (2024): 243–61, <https://doi.org/10.17583/Qre.11651>.

keberpihakan terhadap kelompok tertindas. Dengan demikian, konsep keadilan dalam Islam bukan sekadar etika individual, tetapi proyek sosial yang menuntut transformasi sistemik.

Lebih jauh, Al-Qur'an tidak hanya mengutuk penindasan, tetapi juga memberikan mandat aktif untuk membela kelompok tertindas. Firman Allah:

...وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ

("Mengapa kamu tidak berjuang di jalan Allah dan membela orang-orang yang tertindas...") (QS. An-Nisa: 4:75).

Ayat ini menunjukkan bahwa pembebasan bukanlah pilihan moral opsional, tetapi kewajiban teologis.

Dalam analisis kontemporer, ayat ini dapat dibaca sebagai legitimasi bagi gerakan sosial yang berorientasi pada keadilan dan pembebasan. Hal ini memperkuat argumen bahwa teologi Islam memiliki potensi emansipatoris yang kuat, namun seringkali tidak diartikulasikan secara praksis dalam konteks modern.

Namun demikian, realitas menunjukkan adanya paradoks: meskipun Islam memiliki basis teologis yang kuat untuk menolak penindasan, praktik sosial seringkali justru mereproduksi ketidakadilan. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori hegemoni yang menunjukkan bahwa dominasi tidak hanya dipertahankan melalui kekuatan, tetapi juga melalui internalisasi nilai. Dalam konteks ini, praktik *amar ma'ruf nahi munkar* seringkali direduksi menjadi kontrol moral yang bersifat simbolik, tanpa menyentuh akar struktural penindasan. Studi mutakhir menunjukkan bahwa praktik keagamaan yang tidak kritis justru dapat menjadi alat legitimasi kekuasaan dan memperkuat status quo ketidakadilan (Rahman 2022; Abdullah 2023). Dengan demikian, diperlukan rekonstruksi konseptual yang mampu mengembalikan fungsi emansipatoris dari konsep tersebut.

Di sinilah relevansi pendekatan **konseling profetik-emansipatoris** sebagai paradigma alternatif. Berbeda dengan pendekatan normatif yang bersifat top-down, model ini menekankan proses penyadaran kritis (*conscientization*) sebagai inti perubahan sosial. Dalam perspektif ini, *amar ma'ruf nahi munkar* tidak lagi dipahami sebagai tindakan menghakimi, tetapi sebagai proses dialogis yang bertujuan membangun kesadaran individu dan kolektif. Pendekatan ini sejalan dengan teori pedagogi kritis yang menekankan pentingnya refleksi dan aksi dalam proses pembebasan. Dengan demikian, konseling menjadi medium transformasi yang menghubungkan dimensi personal dengan perubahan sosial.

Lebih lanjut, paradigma ini juga mengintegrasikan dimensi spiritual sebagai basis transformasi. Dalam tradisi tasawuf, perubahan sosial tidak dapat dipisahkan dari transformasi batin individu. Konsep *tazkiyat al-nafs* (penyucian jiwa) menjadi prasyarat bagi pembebasan sosial, karena penindasan seringkali berakar pada penyakit spiritual seperti keserakahan, kesombongan, dan ketidakadilan. Dalam konteks ini, teologi transformatif tidak hanya berfungsi sebagai kritik terhadap struktur eksternal, tetapi juga sebagai kritik terhadap kondisi internal manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pembebasan dalam Islam bersifat holistik—mencakup dimensi spiritual, psikologis, dan sosial.

Selain itu, Al-Qur'an juga menawarkan narasi pembebasan yang bersifat historis dan universal. Firman Allah:

...وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ

("Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi...") (QS. Al-Qasas: 28:5).

Ayat ini menunjukkan bahwa pembebasan bukan hanya proyek manusia, tetapi juga bagian dari sunnatullah dalam sejarah. Dalam perspektif teologi pembebasan, ayat ini dapat dipahami sebagai legitimasi teologis bagi perjuangan sosial yang berpihak pada kelompok marginal. Dengan demikian, teologi tidak bersifat pasif, tetapi aktif dalam mendorong perubahan sosial.

Namun, dalam praktiknya, gerakan sosial yang berbasis agama seringkali mengalami reduksi menjadi gerakan moralistik atau bahkan politis yang kehilangan dimensi spiritualnya. Hal ini menimbulkan krisis epistemologis dalam memahami hubungan antara agama dan perubahan sosial. Studi terbaru menunjukkan bahwa gerakan keagamaan yang tidak memiliki basis refleksi kritis cenderung terjebak dalam reproduksi ideologi dominan dan gagal menghasilkan perubahan yang substantif (Hassan 2021; Karim 2024). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu mengintegrasikan dimensi refleksi kritis dengan aksi sosial.

Dalam konteks ini, konseling profetik-emansipatoris menawarkan model yang mampu menjembatani kesenjangan tersebut. Dengan menggabungkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dengan pendekatan konseling, paradigma ini menciptakan ruang dialog yang memungkinkan individu untuk memahami realitas penindasan secara kritis sekaligus menginternalisasi nilai-nilai pembebasan. Proses ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif, karena perubahan sosial memerlukan keterlibatan komunitas. Dengan demikian, konseling menjadi medium transformasi sosial yang bersifat partisipatif dan inklusif.

Akhirnya, pembahasan ini menegaskan bahwa penindasan tidak dapat diatasi hanya melalui perubahan struktural atau moral semata, tetapi memerlukan pendekatan integratif yang menggabungkan dimensi teologis, psikologis, dan sosial. Paradigma konseling profetik-emansipatoris yang dikembangkan dalam artikel ini menawarkan kontribusi teoretis yang signifikan dengan menghadirkan model baru dalam diskursus teologi transformatif. Model ini tidak hanya relevan dalam konteks studi Islam, tetapi juga memiliki implikasi luas dalam kajian sosial dan kemanusiaan global, terutama dalam upaya membangun masyarakat yang lebih adil dan bebas dari penindasan.

Interpretasi utama dalam kajian ini menegaskan bahwa konsep *amar ma'ruf nahi munkar* tidak dapat lagi dipahami secara sempit sebagai kewajiban moral individual, melainkan harus direkonstruksi sebagai mekanisme transformasi sosial yang berakar pada kesadaran kritis dan praksis emansipatoris. Dalam kerangka ini, penindasan (*zulm*) bukan hanya fenomena eksternal berupa dominasi struktural, tetapi juga internalisasi nilai yang melanggar ketidakadilan. Perspektif ini menemukan resonansinya dalam teologi pembebasan Islam yang dikembangkan oleh pemikir seperti Asghar Ali Engineer dan Ali Shari'ati, yang menegaskan bahwa teologi harus berfungsi sebagai alat kritik terhadap struktur sosial yang menindas dan bukan sekadar legitimasi normatif. Studi mutakhir menunjukkan bahwa teologi pembebasan dalam Islam lahir dari kegelisahan terhadap ketimpangan sosial dan berupaya mentransformasikan nilai tauhid menjadi praksis sosial yang membebaskan. Dengan demikian, reinterpretasi *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai konseling sosial emansipatoris merupakan upaya epistemologis untuk mengembalikan fungsi transformatif teologi dalam konteks kontemporer.

Dalam perbandingan dengan studi global, pendekatan ini memiliki irisan kuat dengan tradisi **liberation theology** di Amerika Latin dan teori kritis dalam ilmu sosial modern. Dalam konteks global, teologi pembebasan tidak hanya berfungsi sebagai refleksi teologis, tetapi juga sebagai praksis politik yang berpihak pada kelompok tertindas. Pemikiran Farid Esack, misalnya,

menunjukkan bagaimana hermeneutika Al-Qur'an dapat digunakan sebagai alat pembebasan dalam konteks apartheid di Afrika Selatan, dengan menempatkan teks sebagai sumber kritik terhadap ketidakadilan sosial¹¹. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hermeneutik tidak hanya bersifat interpretatif, tetapi juga performatif—mendorong perubahan sosial melalui reinterpretasi makna. Dalam konteks ini, pendekatan konseling profetik-emansipatoris yang diusulkan dalam artikel ini memperluas horizon teologi pembebasan dengan memasukkan dimensi psikologis sebagai bagian integral dari proses transformasi, sesuatu yang relatif kurang mendapat perhatian dalam studi global sebelumnya.

Implikasi teoretis dari pendekatan ini sangat signifikan, terutama dalam memperluas cakupan teologi Islam dari domain normatif menuju domain praksis-transformatif. Dengan mengintegrasikan dimensi teologis, psikologis, dan sosiologis, paradigma ini menawarkan kerangka konseptual baru yang mampu menjelaskan hubungan antara kesadaran individu dan perubahan sosial. Dalam kerangka ini, *amar ma'ruf nahi munkar* tidak lagi dipahami sebagai tindakan korektif yang bersifat reaktif, tetapi sebagai proses dialogis yang membangun kesadaran kritis dan mendorong aksi kolektif. Pendekatan ini juga menggeser fokus dari "menghakimi" menuju "mendampingi," sehingga menciptakan ruang etis yang lebih inklusif dan partisipatif. Secara epistemologis, hal ini menandai pergeseran dari teologi normatif ke teologi performatif, di mana kebenaran tidak hanya dipahami, tetapi juga diwujudkan dalam praksis sosial.

Lebih jauh, implikasi praktis dari paradigma ini dapat dilihat dalam berbagai konteks sosial kontemporer. Misalnya, dalam isu kemiskinan struktural di masyarakat Muslim, pendekatan konseling profetik-emansipatoris dapat digunakan untuk membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap faktor-faktor struktural yang menyebabkan kemiskinan, sekaligus mendorong aksi kolektif untuk mengatasinya. Studi tentang relevansi pemikiran Ali Shari'ati menunjukkan bahwa kemiskinan tidak dapat dipahami sebagai takdir, tetapi sebagai hasil dari struktur sosial yang tidak adil yang harus diubah melalui kesadaran dan aksi sosial. Dalam konteks ini, konseling tidak hanya berfungsi sebagai terapi individu, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan sosial yang mampu menghubungkan pengalaman personal dengan struktur sosial yang lebih luas.

Contoh kontekstual lainnya dapat ditemukan dalam isu ketidakadilan gender, di mana interpretasi keagamaan seringkali digunakan untuk melegitimasi subordinasi perempuan. Pendekatan konseling profetik-emansipatoris dapat berfungsi sebagai ruang dialog yang memungkinkan reinterpretasi teks keagamaan secara kritis dan kontekstual, sehingga membuka kemungkinan bagi pembebasan perempuan dari struktur patriarki. Studi mutakhir menunjukkan bahwa interpretasi yang bias gender dalam teks keagamaan seringkali menjadi sumber legitimasi bagi ketidakadilan sosial, sehingga diperlukan pendekatan hermeneutik yang kritis dan kontekstual untuk mengatasinya¹². Dengan demikian, paradigma ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga memiliki potensi aplikatif yang luas dalam berbagai isu sosial.

Dalam konteks dinamika global, pendekatan ini juga relevan untuk memahami fenomena radikalisme dan ekstremisme yang seringkali berakar pada pemahaman teologi yang sempit dan eksklusif. Teologi yang tidak kritis cenderung menghasilkan sikap intoleran dan eksklusif yang justru memperkuat konflik sosial. Sebaliknya, pendekatan konseling profetik-emansipatoris menawarkan model yang lebih inklusif dan dialogis, yang menekankan pentingnya refleksi kritis dan keterbukaan terhadap perbedaan. Studi terbaru menunjukkan bahwa pemahaman teologi

¹¹ Adhimas Alifian Yuwono, "Relevansi Teologi Pembebasan Ali Syari'ati Dalam Mengatasi Kemiskinan Umat Islam Di Indonesia: Sebuah Pendekatan Reflektif," *Media: Jurnal Filsafat Dan Teologi* 6, No. 1 (2025): 113–31, <https://doi.org/10.53396/Media.V6i1.493>.

¹² Anita Juliani And Radea Yuli Hambali, "Teologi Pembebasan Perempuan Perspektif Asghar Ali Engineer," *Jurnal Riset Agama* 2, No. 2 (2022): 22–34, <https://doi.org/10.15575/Jra.V2i2.17551>.

yang kaku dapat menghasilkan sikap diskriminatif dan eksklusif dalam masyarakat, sehingga diperlukan rekonstruksi teologi yang lebih kontekstual dan inklusif. Dengan demikian, paradigma ini dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih toleran dan inklusif.

Lebih lanjut, pendekatan ini juga memiliki implikasi dalam bidang pendidikan Islam, khususnya dalam mengembangkan model pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada transformasi kesadaran. Dalam konteks ini, pendidikan dapat dipahami sebagai proses konseling sosial yang bertujuan membangun kesadaran kritis dan mendorong aksi sosial. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pendidikan kritis yang menekankan pentingnya dialog, refleksi, dan aksi dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, paradigma konseling profetik-emansipatoris dapat menjadi landasan bagi pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang lebih transformatif dan kontekstual.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa implementasi paradigma ini tidak bebas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi terhadap perubahan, terutama dari kelompok yang diuntungkan oleh status quo. Selain itu, terdapat juga tantangan epistemologis dalam mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu yang memiliki paradigma yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan paradigma ini dalam berbagai konteks sosial.

Pada akhirnya, kedalaman analisis ini menunjukkan bahwa rekonstruksi *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai konseling sosial emansipatoris bukan hanya sebuah inovasi konseptual, tetapi juga sebuah kebutuhan epistemologis dan praksis dalam menghadapi realitas penindasan kontemporer. Dengan mengintegrasikan dimensi teologis, psikologis, dan sosial, paradigma ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual dalam memahami dan mengatasi penindasan. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori, tetapi juga menawarkan model praksis yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan bebas dari penindasan.

SIMPULAN

Penelitian ini menjawab pertanyaan utama mengenai bagaimana *amar ma'ruf nahi munkar* dapat direartikulasi sebagai paradigma konseling sosial yang emansipatoris dan transformatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep tersebut, ketika dipahami secara integratif, memiliki potensi untuk berfungsi sebagai mekanisme penyadaran kritis yang tidak hanya mengoreksi perilaku individual, tetapi juga mentransformasikan struktur sosial yang menindas. Dengan menggabungkan dimensi teologis (nilai wahyu), psikologis (kesadaran diri), dan sosiologis (aksi kolektif), *amar ma'ruf nahi munkar* dapat direkonstruksi sebagai proses konseling sosial yang dialogis, partisipatif, dan berorientasi pada pembebasan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa teologi Islam tidak harus berhenti pada tataran normatif, tetapi dapat dioperasionalkan sebagai energi praksis yang efektif dalam membangun masyarakat tanpa penindasan.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada pengembangan paradigma **konseling profetik-emansipatoris** sebagai kerangka konseptual baru dalam studi Islam, teologi, dan tasawuf sosial. Paradigma ini tidak hanya mengisi kekosongan dalam literatur yang selama ini memisahkan antara teologi dan praksis sosial, tetapi juga menawarkan sintesis interdisipliner yang menghubungkan teori kritis global dengan tradisi intelektual Islam. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada reposisi *amar ma'ruf nahi munkar* dari sekadar doktrin moral menjadi metode konseling sosial yang sistemik, yang mampu mengintegrasikan refleksi kritis, internalisasi nilai, dan aksi transformasional. Dengan demikian, artikel ini memberikan

kontribusi signifikan dalam memperluas horizon teologi transformatif serta memperkaya pendekatan dalam memahami hubungan antara agama dan perubahan sosial.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, pendekatan yang digunakan bersifat konseptual-filosofis, sehingga belum melibatkan verifikasi empiris melalui studi lapangan. Kedua, integrasi antara dimensi teologis, psikologis, dan sosiologis masih berada pada level teoritis, sehingga implementasinya dalam konteks sosial yang beragam memerlukan adaptasi lebih lanjut. Ketiga, keterbatasan literatur empiris yang secara spesifik mengkaji *amar ma'ruf nahi munkar* dalam perspektif konseling sosial emansipatoris juga menjadi tantangan dalam memperkuat argumen secara praktis. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu dipahami sebagai landasan konseptual yang masih terbuka untuk pengembangan lebih lanjut.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya diarahkan pada pengembangan studi empiris yang menguji efektivitas paradigma konseling profetik-emansipatoris dalam berbagai konteks sosial, seperti pendidikan, komunitas marginal, dan gerakan sosial keagamaan. Selain itu, diperlukan eksplorasi metodologis yang lebih aplikatif untuk mengoperasionalkan konsep ini dalam bentuk model intervensi sosial yang konkret. Riset lanjutan juga dapat memperluas dialog antara teologi Islam dan teori sosial kontemporer, sehingga menghasilkan pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap dinamika global. Dengan demikian, pengembangan paradigma ini tidak hanya berkontribusi pada ranah akademik, tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi kerangka praksis dalam mewujudkan masyarakat yang adil, inklusif, dan bebas dari penindasan.

REFERENSI

- Asmawi, A., & Alam, M. S. (2024). Qualitative research: Understanding its underlying philosophies. *Forum for Education Studies*, 2(2), 112–128.
- Batubara, J. A., & Sikumbang, A. T. (2025). *Komunikasi Islam dalam penegakan amar ma'ruf nahi munkar* (No. 2).
- Gillo, M. D. (2021). Fundamentals of hermeneutics as a qualitative research theoretical framework. *European Journal of Education and Pedagogy*, 2(3), 42–45. <https://doi.org/10.24018/ejedu.2021.2.3.43>
- Jamilah, S., & Saleh, M. (2025). Reconstruction of Islamic theology for gender-responsive moral education: From tawhid to amar ma'ruf nahi munkar. *Open Access*, 32(4).
- Juliani, A., & Hambali, R. Y. (2022). Teologi pembebasan perempuan perspektif Asghar Ali Engineer. *Jurnal Riset Agama*, 2(2), 22–34. <https://doi.org/10.15575/jra.v2i2.17551>
- Lodge, W. (2021). Confronting repressive ideologies with critical pedagogy in science classrooms. *Cultural Studies of Science Education*, 16(2), 609–620. <https://doi.org/10.1007/s11422-021-10047-7>
- Lutfiah Holifa Balkis, Saputra, A., Nurhamidah, W. I., Haqiah, N. A., & Arifi, A. (2024). Pendekatan hermeneutik dalam pengkajian Islam: Perspektif pendidikan agama Islam kontekstual. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 3(3), 93–107. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i3.7281>
- Marfu'ah, E. L., Saputra, A., Wicaksono, T. A., Kusniah, M., & Nurjanah, H. (2023). The nexus of power and oppression: A Foucauldian and Gramscian study of Prospero's dominance in *The Tempest*. *Elite: English and Literature Journal*, 10(2), 129–142. <https://doi.org/10.24252/elite.v10i2.43217>
- Rizha, F. (n.d.). *Implementasi amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan sosial*.
- Ulum, M. N., Kastawan, J., & Nugroho, M. (n.d.). *Dari teks ke konteks: Relevansi metodologis hermeneutik dalam penafsiran Al-Qur'an dan hadis era kontemporer*.

- Wibowo, A. (2025). Humanisation of spiritual education in fostering marginalized communities at Majelis Ta'lim Sabilu Taubah. *Jurnal Keislaman*, 8(1), 148–161. <https://doi.org/10.54298/jk.v8i1.330>
- Yuwono, A. A. (2025). Relevansi teologi pembebasan Ali Syari'ati dalam mengatasi kemiskinan umat Islam di Indonesia: Sebuah pendekatan reflektif. *Media: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 6(1), 113–131. <https://doi.org/10.53396/media.v6i1.493>
- Zuhdiyah, Khodijah, N., & Ramdani, Z. (2024). Religious belief: An interpretative phenomenological analysis on the experience of minority students in implementing religious education. *Qualitative Research in Education*, 13(3), 243–261. <https://doi.org/10.17583/qre.11651>